

# Konflik Politik Capres SBY, JK, dan Megawati di Media Massa <sup>1</sup>

NILA NURLIMAH

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung

## Abstract

The heat of political situation during presidential election is commonly uprising. So does media situation in portraying conflict between presidential candidates in Indonesia Presidential Election of 2009. A content analysis applied on Pikiran Rakyat daily, a regional newspaper based on West Java province, has identified a practice of conflict construction in their report concerning SBY, JK, and Megawati. Conflict was constructed around some issues focused on administration management, corruption, law enforcement, and economic upheaval. Those issues appeared on several news which tend to illustrate the weaknesses of each presidential candidate.

Situasi politik umumnya memanas menjelang Pemilu. Demikian pula situasi media yang memotret konflik di antara calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Penelitian terhadap pemberitaan HU Pikiran Rakyat mengenai konflik politik Capres SBY, JK, dan Megawati memperlihatkan adanya tendensi konstruksi konflik dalam pemberitaan mengenai para calon presiden. Melalui analisis isi yang melibatkan 3 coder, diperoleh kesimpulan bahwa konstruksi konflik dibangun oleh HU Pikiran Rakyat melalui pemberitaan yang menyudutkan posisi, merendahkan kredibilitas, serta menggambarkan kelemahan Capres dan pasangannya dalam aspek manajemen pemerintahan, pemberantasan KKN, penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi.

Kata Kunci: media, konflik, berita politik

## I. PENDAHULUAN

Independensi Pers Indonesia telah dikekang secara sistematis antara periode akhir dekade 1960-an sampai 1997, oleh Rezim Orde Baru yang berada di bawah kendali Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru yang otoriter secara sistematis memandulkan lembaga pers nasional yang merupakan salah satu infrastruktur dari sistem politik modern. Pers dengan demikian, tidak bisa berperan sebagai *watchdog* terhadap pemerintah dan sebagai penyeimbang kekuatan demokrasi.

Seiring dengan jatuhnya Soeharto dari tahta kekuasaannya pada Mei 1998 tersebut, maka terjadi reformasi total dalam format sistem politik nasional Indonesia. Dari sistem politik yang terpusat pada *executive power* dan ditopang militer dan birokrasi secara efektif, sehingga menjadikan rezim Orde Baru sebagai rezim yang represif, sentralistik, otoriter, dan tertutup, berubah menjadi sistem politik

yang lebih bebas, demokratis, dan transparan, yang ditandai dengan menguatnya eksistensi lembaga pers nasional dalam tatanan infrastruktur politik.

Dengan adanya iklim kebebasan pers yang nyaris tanpa batas, telah mengakibatkan pers tidak mampu melakukan *self censorship* terhadap dirinya. Kondisi ini menyebabkan pers sering mengonstruksi isi pemberitaannya secara *exaggerated* dan dikemas dalam nada yang kental dengan nuansa "provokasi". Sajian pemberitaan yang dapat menimbulkan *spirit* pertentangan dalam ruang publik juga acapkali secara kasat mata menghampiri khalayak. Sebagai ilustrasi, deskripsi berikut, relevan untuk menjelaskan bagaimana pers telah menjadi media provokasi dalam masyarakat:

Sebuah tabloid ibu kota, memuat kepala beritanya, dengan huruf besar mencolok mata, "Gantung Harmoko". Sementara, di halaman muka tabloid lain terpampang: "Bung Kamo Dibunuh." Atau hampir satu halaman penuh kulit muka sebuah tabloid

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan hasil penelitian

<sup>2</sup> Fikom Unisba, Jl. Tamansari No.1 Bandung; email: nila.nurlimah@yahoo.co.id

memproklamkan diri dengan ilustrasi: "Soeharto berwajah ninja" (Malik dalam Ali, 1998: iii).

Secara epistemologi, ada beberapa subjek yang dapat memberikan penjelasan mengenai peranan pers dalam mengonstruksi konflik politik. Salah satunya dapat dilihat dari judul utama pemberitaan yang diangkat oleh Harian Umum *Pikiran Rakyat*, tanggal 25 Mei 2009, seperti terlihat pada pemberitaan yang berjudul: "Anas, Banyak Pemilih PDIP akan Pilih SBY." Judul ini berangkat dari pernyataan salah satu ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang mengomentari seputar pertanyaan pers tentang adanya kader PAN dan PPP yang menghadiri deklarasi capres pasangan Megawati-Prabowo.

Idealnya, pers tidak perlu membesarkan kehadiran beberapa orang kader PAN dan PPP pada deklarasi pasangan Megawati-Prabowo, apalagi sampai meminta komentar dari pihak pasangan SBY-Boediono terhadap kehadiran tersebut. Tidak hanya itu, nuansa konstruksi konflik dari pers menyangkut rivalitas antarpasangan capres menjadi sangat kental, terlihat dari judul "Anas, Banyak Pemilih PDIP akan Pilih SBY", di mana sebenarnya isi dari judul berita yang panas itu sesungguhnya lebih banyak memuat isu dukungan dari partai PKNU kepada pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, dan aktivitas SBY yang mengunjungi pasar seni di Gianyar, Bali. Porsi pemberitaan tentang dukungan partai PKNU kepada pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dan kunjungan SBY ke pasar seni, jauh lebih banyak daripada isi pemberitaan tentang pernyataan Anas Urbaningrum, yang meskipun pernyataan itu sedikit, namun justru dijadikan judul utama oleh *Pikiran Rakyat*.

Tidak berhenti di situ, keesokan harinya, kembali Harian Umum *Pikiran Rakyat* (26 Mei 2009) mengonstruksi konflik dengan mengangkat tudingan cawapres Prabowo dan anggota tim sukses pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, Kwik Kian Gie, yang menyatakan cawapresnya SBY, Boediono sebagai pengusung neoliberalisme, dalam judul utama: "Neolib Panaskan Suhu Politik."

Tudingan tersebut memunculkan reaksi lagi dari kubu SBY-Boediono, yang menyerang balik kubu Jusuf Kalla-Wiranto dan Kubu Megawati-Prabowo. Rizal Mallarangeng, juru bicara tim sukses SBY-Boediono, mengeluarkan pernyataan pedas dengan menanyakan bagaimana *track record* masing-masing capres-cawapres lain (Mega-Prabowo dan JK-Wiranto), sejarah hidup yang seperti apa yang menunjukkan bahwa capres-cawapres memang prorakyat itu harus dikritisi, kata Malarangeng.

Ilustrasi yang menyangkut pemberitaan media tersebut, merupakan penjelasan yang dapat diberikan dalam kerangka bagaimana publik melihat peran media dalam mengonstruksikan konflik antarelit politik yang marak mewarnai dinamika demokratisasi di tanah air menjelang pelaksanaan

Pemilihan Presiden RI, pada 9 Juli 2009.

Secara substansial, menurut Hamijoyo (dalam Jurnal *Mediator* 2001:28), khalayak umumnya memang gemar berita peristiwa krisis atau yang kurang wajar, bukan 'biasa-biasa' saja. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa nonkrisis jarang disebarkan media massa, karena kurang dramatis. Dalam kata-kata Sudibyo (1999:11), "Keterlibatan media dalam sebuah konflik menjadi suatu keniscayaan jurnalistik.

Bagi insan media, konflik bagaikan 'oase yang tak pernah kering' pencarian sumber liputan berita". Namun, menurut Sudibyo *et al.*, (2001:1), sejatinya dalam negara yang demokratis, media massa harusnya menjadi wadah bagi perbedaan pendapat yang sehat, bukan sebaliknya, bertendensi memojokkan pihak-pihak yang berseberangan dengan dirinya.

Fenomena konflik yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun sistem politik Indonesia, memang telah menjadi faktor yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Karenanya, konflik tidaklah menjadi permasalahan yang rumit apabila konflik itu berproses secara alami. Namun, yang menjadi keprihatinan dan permasalahan adalah turut aktifnya pers dalam memicu muncul dan meluasnya semangat pertentangan/konflik dalam masyarakat yang dikonstruksikan melalui pemberitaan-pemberitaan bernada provokatif.

Pada hal, bila dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini-yang masih belum pulih dari terpaan krisis multidimensional serta merebaknya fenomena *centrifugal* di mana, baik pihak pemerintah maupun segenap komponen bangsa, sedang berupaya sekuat tenaga untuk dapat segera keluar dari himpitan krisis yang telah berlangsung lebih dari satu dekade ini, maka maraknya pemberitaan tentang konflik di media massa justru merupakan suatu kondisi yang kontra-produktif bagi bangsa ini.

Mengingat maraknya pemberitaan pers mengenai berbagai konflik (terutama konflik elit politik) tersebut menjadi semakin menarik untuk ditelaah melalui penelitian ilmiah, dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) media massa. Beranjak dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini memfokuskan kajiannya pada analisis isi berita mengenai konflik politik antarpasangan SBY,JK dan Megawati dalam Pemilihan Presiden 2009 di Harian Umum *Pikiran Rakyat*, pada kurun waktu Mei sampai Juni 2009.

Teori *agenda setting* yang merupakan salah satu teori yang lazim digunakan dalam penelitian terhadap media massa pada awal dekade 1970-an hingga saat ini, masih menjadi suatu teori yang populer di kalangan peneliti media massa. Severin dan Tankard (1997) mengatakan, *the first systematic study of the agenda setting hypothesis was*

reported in 1972 by McCombs and Shaw. They studied agenda setting in the presidential campaign of 1968 (Severin & Tankard, 1997:250).

Hasil penelitian McCombs dan Shaw terhadap kampanye pemilihan presiden yang dilaksanakan di wilayah Chapel Hill, Carolina Utara, menyimpulkan bahwa manakala terjadi penonjolan sesuatu topik atau isue di media massa, menyebabkan besarnya pula perhatian publik terhadap topik atau isyu yang telah ditonjolkan oleh media massa tersebut (Tan, 1981: 277).

Sejak penelitian McCombs dan Shaw tersebut, menurut Weaver (dalam Kasiyanto, 1999: 15), kebanyakan penelitian *agenda setting* media lebih terfokus pada bagaimana kemudian publik menyusun agenda peringkat isu-isu penting dihubungkan dengan pemeringkatan isu-isu tersebut, yang dilakukan media massa melalui pemberitaan dan frekuensi peliputan. Hal ini, misalnya, terlihat dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh McCombs & Shaw 1972; McLeod, Becker, & Byrnes 1974; Shaw & McCombs 1977; Weaver, Graber, McCombs, & Eyal 1981; Becker 1982, Weaver 1984; Rogers & Dearing 1988; Protes & McCombs 1991 (Weaver, Jurnal *ISKI* 1999:15).

*Agenda setting* telah membangkitkan minat peneliti pada efek komunikasi massa, sejak McCombs dan Shaw mempublikasikan hasil penelitian mereka pada 1972 lalu, menurut Rakhmat, hanya dalam tempo enam tahun sesudah penelitian itu lebih dari 50 penelitian telah dilaporkan di Amerika (Rakhmat, 2000: 229).

Konsep konstruksi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari khasanah sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*), salah satu acuan teoretisnya adalah paradigma "konstruksi sosial tentang realitas" karya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang berjudul *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge* (1966).

Mereka mengatakan, institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Walaupun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, akan tetapi dalam kenyataannya semua itu dibangun dalam definisi yang subjektif melalui proses interaksi.

Objektivitas hanya bisa terjadi melalui penegasan secara berulang-ulang, yang diberikan oleh individu lain yang memiliki definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolik yang universal, yakni pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi makna pada berbagai bidang kehidupan (Berger dan Luckmann, 1990: 61).

Berger dan Luckmann (dalam Poloma 1979:301-307, Irawanto 1999:19 dan Bungin 2001: 10-15) dengan tegas menyatakan, realitas terbentuk

secara sosial dan tugas terpenting dari sosiologi pengetahuan adalah harus menekuni analisis bagaimana proses pembentukan kenyataan tersebut oleh masyarakat (*social construction of reality*). Mereka mengakui realitas objektif, dengan membatasi realitas sebagai "kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita (sebab ia tidak dapat dienyahkan)". Menurut mereka, semua individu mencari pengetahuan atau kepastian bahwa fenomena adalah riil adanya dan memiliki karakteristik yang khusus dalam kehidupan sehari-hari (Poloma 1979:300-301).

Berger dan Luckmann menganggap dunia sehari-hari tidak diterima masyarakat begitu saja sebagai suatu realitas dalam perilaku yang mempunyai makna subjektif dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan satu dunia yang berasal dari pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan, serta dipelihara sebagai "yang nyata" oleh pikiran dan tindakan itu (Irawanto, 1999:19).

Menurut Berger dan Luckmann, konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang yang hampa, sebaliknya ia justru sarat dengan kepentingan-kepentingan (Bungin, 2001:13). Bagi Berger dan Luckmann (dalam Mulyana, 2001:166), dimensi-dimensi realitas tersebut mencakup berbagai mekanisme untuk memelihara harmoni sosial dan konformitas terhadap norma interaksi, aturan organisasi, pola institusional, dan konsep ideologis.

Konstansi Berger ini menunjukkan bahwa media massa atau pers merupakan realitas simbolik sosial yang berperan membentuk realitas subjektif sosial khalayak. Ini artinya, berita-berita yang dimuat media massa merupakan realitas simbolik yang memengaruhi persepsi khalayak mengenai realitas. Menurut Kasiyanto (dalam Jurnal *ISKI*, 1999:86) sebagai institusi sosial yang memengaruhi realitas subjektif, pers mempunyai tanggung jawab moral terhadap kebenaran informasi. Karenanya, menurut Suseno (1986), etos dasar pers tak lain adalah etos kebenaran.

Kebenaran dalam pengertian etis ini adalah memberitakan keadaan sebenarnya (Suseno, 1996 dalam Kasiyanto, 1999:86). Untuk itulah dalam konteks ini, menurut Kasiyanto (dalam Jurnal *ISKI*, 1999:86) sering disebutkan jurnalisme ideal adalah yang dapat membuat *discourse* berita media identik dengan realitas sosial. Dengan kata lain, seperti diungkapkan Siregar (1994), membaca media massa sama dengan membaca masyarakat, walaupun tidak dapat disimpulkan bahwa setiap media massa otomatis cermin masyarakat, mengingat ada faktor lain yang ikut menentukan muatan pers (Siregar, dalam Kasiyanto, 1999:86).

Secara substansial, karena berita merupakan sebuah konstruksi ulang terhadap suatu realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka sebuah berita bisa saja keliru, dan bukan tidak

mungkin sebuah berita memang sengaja dikelirukan. Menurut Sobur (2001: 257), kekeliruan ini bisa terjadi karena keterbatasan wartawan, karena sifat-sifat manusiawi insan pers, juga karena adanya unsur kesengajaan.

Contoh yang dapat menggambarkan terjadinya kekeliruan pada isi berita yang disengaja dalam suatu pemberitaan, secara gamblang dapat ditemukan dalam pernyataan Adinegoro (1961) seperti dilansir oleh Sobur dalam karyanya yang berjudul *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani* (2001: 257-258), yang menyatakan bahwa:

- (1) Bagian yang penting dari berita itu dilenyapkan oleh wartawan yang berkepentingan, supaya pembaca jangan mengetahuinya. Redaktur melakukan sensor terhadap publiknya tentang hal-hal yang bisa merugikan keberadaan surat kabarnya, golongannya, atau partainya. Dicoretinya suatu isu atau sama sekali dilarang untuk diberitakan, dengan demikian, publik sengaja tidak dibolehkan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang peristiwa atau gejala yang dijadikan berita itu,
- (2) Bagian yang tidak penting dibesar-besarkan kepentingannya. Hal yang kecil sekali artinya, dibesar-besarkan. Sebaliknya, hal yang besar artinya, dikecilkan; yang seharusnya pendek dipanjang-panjangkan,
- (3) Melenyapkan sama sekali satu berita supaya tidak diketahui publik dan menyiarkan satu berita yang bertentangan yang dianggap "menguntungkan."
- (4) Memalsukan berita kejadian dengan membuat berita untuk maksud-maksud tertentu,
- (5) Memakai cara yang tidak *fair* untuk menyesatkan anggapan pembaca; umpamanya dengan menggunakan kata-kata yang bersifat mengejek atau mencemooh.

Adanya berbagai keterbatasan dan kepentingan yang melingkupi ruang gerak media massa, kondisi ini sangat kuat mewarnai pola-pola media massa dalam merekonstruksi realitas sosial dalam pemberitaannya, yang disertai dengan alasan-alasan tertentu tentang "perluannya" media melakukan seleksi terhadap fakta atau peristiwa tersebut, pada akhirnya tidak jarang telah menyebabkan pers terjebak dalam subjektivitas sempit serta menegaskan prinsip-prinsip impartialitas dalam pemberitaannya.

Secara teoretis, salah satu prinsip penilaian terhadap kinerja dan penampilan media, menurut McQuail (1987: 129) adalah objektivitas. Memang, dalam realitanya prinsip objektivitas ini hanya mempunyai cakupan yang lebih kecil dibanding dengan prinsip lain seperti *kebebasan*, *persamaan*, dan *ketertiban* (terutama dalam arti solidaritas dan integrasi masyarakat bersama komponen lainnya) tetapi prinsip objektivitas memiliki fungsi yang tidak

boleh dianggap remeh, terutama dalam kaitannya dengan kualitas berita atau informasi.

Bagi McQuail (1987: 129), prinsip objektivitas tersebut maknanya dapat berasal dari berbagai sumber. Oleh karena itu, prinsip objektivitas mengandung sekian banyak pengertian, antara lain: objektivitas merupakan nilai sentral yang mendasari disiplin profesi yang dituntut oleh para wartawan sendiri; objektivitas mempunyai korelasi dengan independensi, dan objektivitas diperlukan untuk memertahankan kredibilitas.

Sampai abad 21 sekarang ini, mengkaji persoalan objektivitas media massa masih merupakan diskursus yang hangat. Banyak ahli yang masih berpolemik seputar hakikat objektivitas media tersebut. Perdebatan tajam yang pernah terjadi mengenai nilai objektivitas media massa adalah perdebatan antara John C. Merrill dan Everette E. Dennis (lihat Siahaan *et al.*, 2001: 60-61, dan Jurnal Komunikasi *Kupas* Volume 3. Nomor 2, 2001: 42). Menurut Merrill, objektivitas jurnalisme adalah omong kosong dan mustahil, karena adanya nilai-nilai subjektif dalam diri wartawan, misalnya ketika seorang wartawan memutuskan narasumber mana yang akan diwawancarainya untuk mendukung fakta yang akan dituliskannya, pada saat itu subjektivitas wartawan itu sudah muncul. Bagi Merrill, liputan dua sisi (*cover both sides*) adalah mitos, sebab pada dasarnya wartawan bukan robot yang mengambil fakta atas dasar pertimbangan objektif.

Pernyataan Merrill tersebut dibantah oleh Dennis yang beranggapan bahwa objektivitas jurnalisme bukan sesuatu yang mustahil. Jurnalisme objektif bisa saja dilakukan, karena semua proses kerja jurnalistik pada dasarnya dapat diukur dengan ditentukan indikator-indikator tertentu guna menilai keobjektivitasan pers / wartawan. Contohnya adalah dengan memisahkan fakta dan opini, mengabaikan perasaan emosional, sehingga tidak mengabaikan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam melihat suatu peristiwa, sesuai dengan metode dan prosedur yang dapat membatasi subjektivitas wartawan maupun redaktur tersebut (Siahaan *et al.*, 2001: 60-61, dan Jurnal Komunikasi *Kupas* Volume 3. Nomor 2, 2001: 42).

Pendapat yang menengahi terjadinya pro dan kontra seputar penerapan prinsip objektivitas media massa ini, menyatakan bahwa pemberitaan pers tidak perlu harus selalu objektif. Pers harus berpihak pada nilai-nilai tertentu, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kepentingan masyarakat. Tetapi, opini atau kritik terhadap suatu keadaan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai tertentu tadi perlu didasarkan pada data dan pengetahuan yang seobjektif mungkin (Hidayat 1994, dalam Siahaan *et al.*, 2001:62).

Mencermati prinsip objektivitas dalam pemberitaan media massa, mengingatkan pada suatu pernyataan yang dikemukakan oleh Effendi

(1986) dalam Sobur (2001: 260) yang mengatakan bahwa ada beberapa usaha yang dapat dilakukan guna mendekati suatu objektivitas atau kebenaran berita, yaitu dengan mengedepankan sikap jujur dalam memberitakan suatu realita, menghindari kata-kata opinionatif, dan membubuhkan aspek-aspek yang relevan dalam pemberitaan tersebut.

Tuntunan ideal yang dikemukakan Effendi tersebut sangat beralasan mengingat betapa persoalan objektivitas media ini merupakan persoalan substansial dalam dunia pers itu sendiri, terlebih bila dikaitkan dengan tujuan dasar dari adanya lembaga pers, yakni dalam rangka memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan agar terwujud suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berdaya, bukan sebaliknya menegasikan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Ali, dalam Jurnal *ISKI* (1998:17), karena adanya ketidakobjektifan media, telah mengakibatkan pers tidak mungkin berperan sebagai media efektif dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam literatur Ilmu Sosial, dikenal dua pendekatan yang saling bertentangan dalam memandang masyarakat. Yang pertama berupa Pendekatan Struktural Fungsional (Konsensus) dan kedua, adalah Pendekatan Struktural Konflik (Surbakti, 1992:149).

Bagi penganut Pendekatan Struktural Konflik, fenomena konflik bukanlah suatu gejala sosial yang bersifat negatif, seperti yang diasumsikan oleh Ahli Pendekatan Struktural Fungsional (Konsensus). Sebab, apabila ditelaah secara seksama dan mendalam, konflik mempunyai fungsi positif, yaitu sebagai pengintegrasikan masyarakat dan sebagai sumber perubahan struktur sosial (Dahrendorf, 1969 dalam Surbakti 1999: 150, dan dalam Poloma 1979: 138).

Sementara itu, dalam perspektif Weber, konflik menduduki tempat yang sentral dalam hubungan masyarakat, karena konflik merupakan unsur dasar dalam kehidupan umat manusia (Weber 1968, dalam Laeyendecker 1991:324). Selanjutnya, Weber mempertegas pendapatnya ini dalam konstasi berikut:

Pertentangan (konflik) tidak dapat dilenyapkan dari kehidupan budaya manusia. Orang dapat mengubah sarana-sarannya, objeknya, arah dasar atau pendukung-pendukungnya, tetapi orang tidak dapat membuang konflik itu sendiri (Weber 1968, dalam Laeyendecker 1991: 324).

Bagi Weber, konflik merupakan fenomena sosial yang sangat mendasar baik pada integrasi maupun perubahan sosial; hal ini terungkap paling tajam dalam politik (perjuangan demi kekuasaan) dan di dalam persaingan ekonomi (Weber dalam Laeyendecker, 1991: 324).

Secara teoretis, dalam perspektif sistem sosial, menurut Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse (1999: 7-8), konflik adalah suatu aspek

intrinsik yang tidak mungkin dapat dihindarkan dalam perubahan sosial. Mereka memaknai konflik sebagai sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan, yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh adanya perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa pada dasarnya cara orang menangani konflik adalah menyangkut persoalan kebiasaan dan pilihan.

Pada konteks pemilihan cara penyelesaian konflik oleh elit politik inilah *domain* dari studi komunikasi politik. Medium komunikasi politik yang banyak digunakan adalah pers. Dalam posisinya sebagai medium komunikasi politik ini, menurut Waisbord (1996) dalam Malik (Jurnal *ISKI*, 2001: 74), pers dihadapkan pada dua jenis kultur jurnalistik, yaitu:

- (1) *Journalism as independent observer*; suatu kultur yang mengedepankan ideologi profesional bahwa media massa berfungsi sebagai "penjaga kepentingan publik" atau "pilar keempat" demokrasi. Implikasi dari ideologi ini adalah, berita apa pun yang menyangkut konflik, sepanjang itu aktual, harus diberitakan secara tajam apa adanya. Bahkan pengungkapan peristiwa konflik adalah bagian dari ideologi kaum jurnalis ini. Bagi wartawan kelompok ini, konflik adalah bagian dari "nilai berita" yang penting.
- (2) *Journalism as political activism*; bagi wartawan aliran ini, pemuatan berita konflik sangat bergantung pada konteks dan kepentingan serta kondisi sosio-politik zamannya. Hal ini dilakukan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Di saat situasi penuh konflik dan *chaos*, media massa justru menyikapinya dengan lebih mengutamakan proses ke arah konsensus yang adil. *Conflict resolution* adalah fokus yang diutamakan dalam pemberitaan.

Pada penelitian ini, penarikan sampel menggunakan teknik *stratified random sampling* dengan *alokasi proporsional*. Penarikan sampel dengan pola alokasi proporsional ini dilakukan dengan menggunakan rumus (dalam Nazir, 1999: 361):

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

*Keterangan:*

N = ukuran populasi

n = ukuran sampel yang ditetapkan.

Dalam model penelitian yang didasarkan pada metode analisis isi, maka untuk memperoleh objektivitas data yang reliabel perlu dilaksanakan uji reliabilitas antarpelaku koding melalui suatu langkah uji statistik. Perhitungan terhadap uji reliabilitas yang peneliti gunakan dalam penelitian

ini adalah dengan uji statistik *Chi Square*. Uji *Chi Square* ini digunakan untuk mencari kecocokan antarpelaku koding, digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati menyimpang secara signifikan dari suatu distribusi hipotesis atau distribusi yang diharapkan (Nazir, 1999: 475).

Berikut diuraikan rumus *Chi Square* tersebut:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_{o_i} - f_{i_i})^2}{f_{e_i}}$$

**Keterangan:**

$f_{o_i}$  = Frekuensi yang diamati, kategori ke-i,  
 $f_{e_i}$  = Frekuensi yang diharapkan dari kategori ke-i,  
 k = Jumlah kategori.

Rumusan hipotesis yaitu:

$H_0$  : Terdapat kecocokan.

$H_1$  : Tidak terdapat kecocokan.

Kaidah keputusan:

Jika  $\chi^2 > \chi^2_{\alpha}$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima.

Jika  $\chi^2 \leq \chi^2_{\alpha}$  maka  $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak.

$\chi^2_{\alpha}$  diperoleh dari tabel *chi-square* untuk tingkat kepercayaan tertentu (dalam penelitian ini digunakan 95% dengan derajat kebebasan k-1).

Selanjutnya, untuk melihat tingkat kecocokan, digunakan koefisien kontingensi Pearson, yaitu:

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{n + \chi^2}}$$

di mana Indeks Reliabilitasnya (IR)= (1-C) x 100%

Pada tahap berikutnya, setelah diperoleh persentase tingkat kesepakatan dari para *coder* tersebut, maka hasilnya perlu dikonfirmasi dengan ketentuan besaran koefisien korelasi. Penafsiran akan besarnya koefisien korelasi ini umumnya digunakan indeks Guilford, yaitu:  
 0 % - 20% : korelasi yang rendah sekali  
 21% - 40% : korelasi yang rendah tetapi ada  
 40% - 70% : korelasi sedang  
 70% - 90% : korelasi yang tinggi  
 90% - 100% : korelasi yang tinggi sekali  
 (dalam Surakhmad, 1982: 302 dan Rakhmat, 1984: 29).

**II. PEMBAHASAN**

Pembahasan mengenai berita konflik politik antara capres SBY, JK, dan Megawati yang dimuat pada halaman pertama oleh Harian *Pikiran Rakyat*, dilakukan pada frekuensi kemunculan konstruksi kategori, yaitu: (1) Konstruksi kategori sudut penggambaran kelemahan SBY,JK yang dikonstruksi pers dalam pemberitaannya berdasarkan ucapan langsung/tidak langsung yang bersifat menyudutkan posisi, menjatuhkan kredibilitas, memprovokasi, atau menentang dari kalangan Megawati

menyangkut berbagai kelemahan SBY,JK dalam; manajemen pemerintahan (man), pemberantasan KKN (kkn), penegakan hukum (huk), pemulihan ekonomi (eko), ucapan, sikap, dan tindakan presiden (ust), kelemahan orang perorang (eop). (2) Konstruksi kategori sudut penggambaran kelemahan Megawati yang dikonstruksi pers dalam pemberitaannya berdasarkan ucapan langsung/tidak langsung yang bersifat menyudutkan posisi, menjatuhkan kredibilitas, memprovokasi dari kalangan SBY, JK, menyangkut kelemahan Megawati dalam pelaksanaan fungsi partai (*mep*) ataupun kelemahan Megawati dalam konteks perseorangan (*mop*).

**A Konstruksi kategori Sudut Penggambaran Kelemahan SBY,JK**

Berikut diuraikan tabel 1 penghitungan terhadap konstruksi kategori dari sudut penggambaran kelemahan SBY, JK dalam pemberitaan konflik politik antara eksekutif SBY, JK dan Megawati di Harian *Pikiran Rakyat*:

Tabel 1  
**Kelemahan SBY, JK dari Sifat Ucapan Kalangan Megawati**

No	Konstruksi Kategori	Coder			Total	
		Klmh. SBY,JK	Sifat Ucp.	Nilai		Derajat Beddy
1	Man	Pos	18	28	28	74
		Dis	70	66	67	203
		Pro	24	25	23	72
		Tan	0	0	0	0
2	Kkn	Pos	1	1	1	3
		Dis	2	3	3	8
		Pro	1	1	1	3
		Tan	0	0	0	0
3	Huk	Pos	2	2	2	6
		Dis	16	16	16	46
		Pro	8	7	8	21
		Tan	0	0	0	0
4	Eko	Pos	0	0	0	0
		Dis	5	5	6	16
		Pro	2	0	0	2
		Tan	0	0	0	0
5	Ust	Pos	18	16	21	55
		Dis	7	9	8	24
		Pro	3	5	6	14
		Tan	0	0	0	0
6	Eop	Pos	3	2	4	9
		Dis	6	5	6	17
		Pro	1	3	0	4
		Tan	0	0	0	0

Sumber: Angket

Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya dapat digambarkan pula frekuensi secara umum mengenai berbagai kelemahan SBY, JK yang merupakan konstruksi kategori pertama dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2  
Penggambaran Frekuensi Kemunculan Kelemahan SBY, JK

No	Konstruksi Kelemahan	Kategori SBY, JK	Coder Nila	Total Darajat	Deddy
1	Man	112	119	118	349
2	Kkn	4	5	5	14
3	Huk	25	24	24	73
4	Eko	7	5	6	18
5	Ust	29	32	35	96
6	Eop	10	10	10	30
Jumlah		187	195	198	580

Tabel tersebut menunjukkan sebaran frekuensi penggambaran kelemahan SBY yang dikonstruksi *Pikiran Rakyat* berdasarkan pada ucapan yang bersifat menyudutkan posisi, menjatuhkan kredibilitas, memprovokasi, dan menentang yang berasal dari kalangan eksekutif ataupun pihak lain terhadap eksekutif.

Selanjutnya, dalam rangka melakukan pengujian terhadap tingkat kesepahaman antar-coder dalam mengidentifikasi konstruksi kategori ini akan dilakukan uji reliabilitas, yang juga secara paralel dilakukan uji hipotesis.

Tabel 3  
Penggambaran Frekuensi Kemunculan Kelemahan SBY, JK

No	F <sub>o</sub>	F <sub>c</sub>	F <sub>o</sub> -F <sub>c</sub>	$\frac{(f_{oi} - f_{ci})^2}{f_{e_i}}$
1	112	112.5224	-0.522	0.002
2	119	117.3362	1.664	0.023
3	118	119.1414	-1.141	0.011
4	4	4.513793	-0.514	0.066
5	5	4.706897	0.293	0.017
6	5	4.77931	0.221	0.010
7	25	23.53621	1.464	0.086
8	24	24.5431	-0.543	0.012
9	24	24.92069	-0.921	0.035
10	7	5.803448	1.197	0.205
11	5	6.051724	-1.052	0.221
12	6	6.144828	-0.145	0.003
13	29	30.95172	-1.952	0.131
14	32	32.27586	-0.276	0.002
15	35	32.77241	2.228	0.142
16	10	9.672414	0.328	0.011
17	10	10.08621	-0.086	0.001
18	10	10.24138	-0.241	0.006
<b>Jumlah</b>				<b>0.985</b>

Dalam penelitian ini digunakan kaidah penentuan hipotesis, untuk H<sub>0</sub>: berarti terdapat kecocokan di antara *coder*; dan H<sub>1</sub>: yang berarti tidak terdapat kecocokan di antara *coder*. Dari tabel 3 tersebut yang merupakan langkah statistik dalam proses pengujian tingkat kesepahaman antar-coder diperoleh angka 0,985, yang merupakan nilai kuadrat *Chi* (X<sup>2</sup>). Perolehan nilai kuadrat *Chi* ini penting bagi langkah penghitungan berikutnya berupa penghitungan koefisien kontingensinya.

Berikut deskripsi penghitungan tingkat kesepahaman antar-coder tersebut, dilakukan dengan penghitungan *chi square*:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_{oi} - f_{ci})^2}{f_{e_i}} = 0.985$$

Pada pembahasan terhadap konstruksi kategori mengenai kelemahan SBY, JK terdapat 6 kelompok (k=6), sehingga dk = k-1 = 6-1 = 5, dari tabel *chi-square* untuk alpha 5% diperoleh nilai  $\chi^2_{11.1}$ , karena  $\chi^2 \leq \chi^2_{11.1}$  maka H<sub>0</sub> diterima, ini berarti terdapat kecocokan pemahaman antartetiga *coder* dalam menilai konstruksi kategori menyangkut berita konflik politik antara SBY, JK dan Megawati berdasarkan pada sudut penggambaran kelemahan SBY, JK.

Selanjutnya, guna melihat tingkat keerratan mengenai kecocokan tersebut, akan dihitung dengan menggunakan rumus koefisien kontingensi Pearson (C), dari penghitungan diperoleh hasil berikut:

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{1 + \chi^2}} = \sqrt{\frac{0.985}{580 + 0.985}} = \sqrt{\frac{0.985}{580.985}} = 0.0412$$

Hasil (C) ini dikonfirmasi lagi dengan penghitungan Indeks Reliabilitas dari Guilford; IR= (1-C)x100%, maka diperoleh hitungan akhir sebesar (1-0.0412) x 100%= 95.88%.

Dengan demikian, nilai koefisien reliabilitasnya sebesar 95,88%. Nilai ini menunjukkan tingkat keerratan antar-coder yang besar. Ini berarti bahwa pengidentifikasian konstruksi kategori mengenai kelemahan SBY, JK yang dilakukan ketiga *coder* sudah baik.

### B. Konstruksi Kategori Sudut Penggambaran Kelemahan Megawati

Seperti halnya SBY, JK *Pikiran Rakyat* juga mengangkat isu-isu mengenai kelemahan Megawati. Berikut ini, dideskripsikan kelemahan Megawati tersebut dalam menjalankan fungsi kepartaiannya ataupun kelemahan yang menyangkut kapasitas secara individual berdasarkan ucapan langsung /tidak langsung yang disampaikan oleh kalangan SBY,JK. Untuk kategori tema berdasarkan kelemahan Megawati diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4  
**Kelemahan Megawati dari Sifat Ucapan Kalangan SBY, JK**

No	Konstruksi Klmh. Megawati	Kategori Sifat	Coder			Total
			N	Dj	Dd	
1	Mep	Pos	6	9	8	23
		Dis	19	20	19	58
		Pro	9	6	6	21
		Tan	0	0	0	0
2	Mop	Pos	1	1	1	3
		Dis	3	1	2	6
		Pro	0	0	0	0
		Tan	0	0	0	0

Tabel ini memperlihatkan ada ucapan yang memenuhi unsur dalam konstruksi kategori (menyudutkan posisi, merendahkan kredibilitas, memprovokasi). Selanjutnya, digambarkan pula frekuensi umum mengenai kelemahan Megawati yang merupakan konstruksi kategori kedua dalam penelitian ini, seperti berikut:

Tabel 5  
**Penggambaran Frekuensi Kemunculan Kelemahan Megawati**

No	Konstruksi Kategori Klmh. Megawati	Coder			Total
		N	Dj	Dd	
1	Bidang kepartaian(mep)	34	35	33	102
2	Orang perorang (mop)	4	2	3	9
	Jumlah	38	37	36	111

Dari tabel ini terlihat adanya sebaran frekuensi penggambaran kelemahan Megawati yang dikonstruksi oleh *Pikiran Rakyat* berdasarkan pada ucapan yang bersifat menyudutkan posisi, menjatuhkan kredibilitas, dan memprovokasi terhadap Megawati dalam konteks institusional yang berasal dari kalangan SBY, JK. Sementara itu, dalam kaitannya dengan kelemahan Megawati secara perseorangan hanya ada dua unsur saja dari empat unsur dalam konstruksi kategori, yaitu berupa ucapan yang bersifat menyudutkan posisi dan menjatuhkan kredibilitas Megawati secara perseorangan.

Langkah berikutnya dalam rangka melakukan pengujian terhadap tingkat kesepahaman antar-coder dalam mengidentifikasi konstruksi kategori ini perlu dilakukan uji reliabilitas. Di samping itu, juga diiringi dengan pelaksanaan uji hipotesis. Dalam penelitian ini, kaidah penentuan hipotesis ditetapkan

berupa konstataasi:  $H_0$  yang berarti terdapat kecocokan di antara coder; dan  $H_1$ : yang berarti tidak terdapat kecocokan di antara coder. Kemudian berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6  
**Indeks Reliabilitas Kelemahan Megawati**

No	Fo	Fe	Fo-Fe	
1	34	34.91892	-0.919	0.025
2	35	34	1.000	0.029
3	33	33.08108	-0.081	0.000
4	4	3.081081	0.919	0.211
5	2	3	-1.000	0.500
6	3	2.918919	0.081	0.002
<b>Jumlah</b>				<b>0.767</b>

Berdasarkan pada tabel ini yang merupakan langkah statistik dalam proses pengujian untuk memperoleh nilai tingkat kesepahaman antar-coder; dari penghitungan ini diperoleh angka 0,767 yang merupakan nilai kuadrat *Chi* ( $X^2$ ) untuk konstruksi kategori kelemahan Megawati. Perolehan nilai kuadrat *Chi* ini sangat dibutuhkan dalam tahap penghitungan berikutnya berupa penghitungan koefisien kontingensi guna memperoleh besaran prosentase dari tingkat keamatan hasil pengkodean tersebut.

Berikut deskripsi penghitungan tingkat kesepahaman antar-coder tersebut, dilakukan dengan penghitungan *chi square*:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(fo_i - fi_i)^2}{fe_i} = 0.767$$

Dalam pembahasan tentang konstruksi kategori kelemahan Megawati ini yang terdiri atas 2 kelompok ( $k=2$ ) sehingga  $dk = k-1 = 2-1 = 1$ , dari tabel *chi-square* untuk alpha 5% diperoleh nilai =3.84, karena itu maka  $H_0$  diterima. Dengan demikian hal ini berarti adanya kecocokan antar ketiga coder dalam menilai konstruksi kategori konflik berdasarkan kelemahan Megawati.

Langkah berikutnya dalam rangka memperoleh derajat keamatan mengenai kecocokan persepsi antar-coder tersebut, akan dihitung dengan menggunakan rumus koefisien kontingensi Pearson ( $C$ ), dari penghitungan itu diperoleh hasil seperti berikut:

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{n + \chi^2}} = 0.0828.$$

Hasil penghitungan yang telah diperoleh melalui kontingensi Pearson ( C ) ini kemudian dikonfirmasi lagi dengan penghitungan Indeks Reliabilitas dari Guilford;  $IR = (1-C) \times 100\%$ , maka diperoleh hasil  $(1-0.0828) \times 100\% = 91,72\%$ .

Dengan demikian, dari penghitungan konfirmatif melalui IR Guilford ini yang memperoleh nilai koefisien reliabilitasnya sebesar 91,72 %, maka nilai ini memperlihatkan adanya tingkat keeratan antar-coder yang besar, yang berarti bahwa pengidentifikasian terhadap konstruksi kategori mengenai kelemahan Megawati yang dilakukan oleh ketiga coder sudah baik.

### III. PENUTUP

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat konstruksi konflik antarpasangan capres-cawapres peserta Pemilihan Presiden RI, tahun 2009 pada pemberitaan Harian Umum *Pikiran Rakyat*. Terlihat dari pemuatan komentar atau ucapan dari masing-masing capres-cawapres atau pihak lain (tim sukses, anggota partai pendukung masing-masing kandidat) yang memprovokasi, menyudutkan posisi, dan merendahkan kredibilitas, yang menggambarkan kelemahan capres-cawapres lain dalam aspek manajemen pemerintahan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penegakkan hukum, dan pemulihan ekonomi.

Sekalipun tidak dibesar-besarkan oleh pers, kondisi dan suhu sosial politik yang lazim mengiringi suatu kegiatan pemilihan umum, memang cenderung memanas, apalagi bila memang pers ikut memanas keadaan melalui berbagai pemberitaan politik panas dan sensitif yang memunculkan sentimen negatif pada pihak-pihak yang berseteru, niscaya pemberitaan pers tersebut, menjadi faktor yang memerkeruh situasi yang memang sudah panas secara alamiah, karena kompetisi politik memerebutkan kursi kekuasaan.

Dalam konteks penyikapan terhadap isi berbagai pemberitaan pers yang cenderung mengonstruksi konflik antarpasangan capres-cawapres peserta pemilihan presiden RI, tahun 2009, perlu peneliti ajukan beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

Konflik, apa pun bentuknya, terlebih konflik politik, memang merupakan nilai berita yang penting bagi media massa. Namun, sebaiknya media massa dapat mengonstruksikan kembali konflik tersebut dalam batas-batas pemberitaan yang sesuai dengan kondisi nyatanya, karena bila dalam pemberitaan tersebut kental dengan nuansa konflik, secara akumulatif tidak mustahil dapat menyebabkan timbulnya vandalisme politik, sehingga akan semakin memperburuk kondisi krisis yang sedang dialami bangsa saat ini.

Cara-cara penyelesaian konflik dengan mengedepankan kekuatan, baik fisik, material, atau

kekuasaan, seperti yang terjadi sepanjang sejarah kemerdekaan bangsa, sebaiknya tidak perlu terulang kembali. Perlu menjadi kesadaran yang hakiki bagi setiap elite politik untuk senantiasa mengedepankan semangat kebersamaan dalam bingkai komunikasi suportif, karena pola penyelesaian konflik dengan pendekatan kekerasan akan semakin memperburuk situasi, sehingga bila cara-cara kekerasan yang terus digunakan dalam mengatasi konflik, bukan tidak mungkin integritas bangsa yang akan menjadi taruhannya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Berger, Arthur Asa (2000). *Media Analysis Techniques*. Edisi Bahasa Indonesia: *Teknik-Teknik Analisis Media*. Alih Bahasa: Setio Budhi HH. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann (1990). *The Social Construction of Reality A Treatise in The Sociology of Knowledge*. Edisi Bahasa Indonesia, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Alih Bahasa: Hasan Basari. LP3ES, Jakarta.
- Bungin, Burhan (2001). *Imaji Media Massa; Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*. Jendela Press, Yogyakarta.
- Hanitzsch, Thomas (2001). "Misi Sosial atau "Mission Impossible" tentang Otonomi Proses Produksi Berita" dalam Lukas S. Ispandriarno, Thomas Hanitzsch, dan Martin Loeffelholz, (eds). *Media – Militer – Politik Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Internasional*. Friedrich Ebert Stiftung bekerja sama dengan Galang Press, Yogyakarta. 2002.
- Harmoko, H. (1990). "Peranan Pers dalam Mengembangkan Komunikasi Politik", dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1993.
- Hidayat, Dedy N, Effendi Gazali, Harsono Suwardi, dan Ishadi S.K. (eds) (2000). *Pers dalam "Revolusi Mei"; Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hikam, Muhammad A.S (1999). *Politik Kewarganeraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Krisnawan, Yohanes (1997). *Pers Memihak Golkar? Suara Merdeka dalam Pemilu 1992*. Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.
- Muis, A. (2001). *Komunikasi Islami*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nazir, Moh. (1999). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rakhmat, J. (2000). *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sobur, A. (2001). *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. Humaniora Utama Press, Bandung.
- Sudibyo, A. (1999). *Citra Bung Karno Analisis Berita Pers Orde Baru*. Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Sudibyo, Agus. (2001) *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. LKiS, Yogyakarta.
- Sudibyo, Agus., Ibnu Hamad, dan Muhammad Qodari (2001). *Kabar-Kabar Kebencian Prasangka Agama di Media Massa*. Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.
- Surakhmad, Winarno (1982). *Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*. Tarsito, Bandung.
- B. Lain-lain**
- Ali, Novel. (1998) "Pers Objektif, Media Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif," dalam Jurnal Komunikasi *ISKI* Volume I / Juli 1998. ISKI dan Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kasiyanto (1999). "Informasi Realitas sebagai Bentuk Reformasi Pemberitaan Media Massa: Sebuah Apresiasi Masyarakat Desa," dalam Jurnal Komunikasi *ISKI* Volume IV / Oktober 1999. ISKI dan Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Malik, Dedy Djamaluddin (2001). "Dari Konstruksi ke Dekonstruksi: Refleksi atas Pemberitaan Televisi Kita," dalam Jurnal *ISKI* Volume VI / November 2001. *ISKI* dan Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyana, Deddy (2002). "Mempersiapkan Para Jurnalis Menyongsong Era Global" dalam Jurnal Komunikasi *Mediator* Vol. 3. No. 1. 2002. Fikom Unisba, Bandung.
- Rakhmat, Jalaluddin (2001). "Komunikasi Defensif." Dalam Tabloid *Detak* Edisi No. 140 Th. III. 23 Mei 2001. Jakarta.